

BAB I

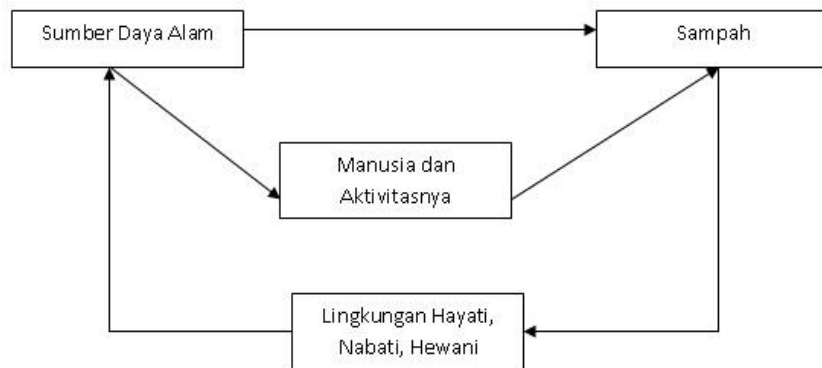
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Era Globalisasi yang sangat maju ini menuntut manusia untuk merubah peradaban yang memberikan dampak persoalan lingkungan yang tak bisa dihindari. Globalisasi ibaratkan logam yang mempunyai dua sisi. Satu sisi dimana memberikan kemudahan akses bagi individu atau kelompok sedangkan satu sisi memberikan mmemberikan dampak negatif berbagai aspek yang salah satunya adalah dampak terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan dalam globalisasi ini menyerang hampir di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang menerima arus Globalisasi. Dalam kasus ini berarti masyarakat Indonesia dituntut untuk memperbaharui gaya hidup dengan cara memproduksi dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin tinggi kebutuhan manusia maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat konsumsi. Dengan tingginya pola konsumsi masyarakat makan akan timbul permasalahan sampah

Gambar 1.1
Sumber Terjadinya Sampah



Sumber :<http://www.belajaripa.net>

Pencemaran lingkungan bisa disebut polusi terbagi menjadi tiga yaitu polusi tanah, air, dan udara. Salah satu faktor polusi tersebut adalah akibat dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memperhatikan dampak selanjutnya terhadap lingkungan. Secara keseluruhan pencemaran lingkungan terjadi pada kota-kota di Negara berkembang. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut Indonesia mempunyai Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah .

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi:

1. Pembatasan timbulan sampah
2. Pendaaran ulang sampah, dan/atau
3. pemanfaatan kembali sampah

Sedangkan kegiatan penanganan meliputi :

1. Pemilihan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan
5. Pemrosesan akhir sampah

Permasalahan sampah di Indonesia adalah salah satu masalah nasional yang sampai saat ini belum menemui solusi. Menurut Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan Sri Bebasari tingkat pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di Indonesia, ibarat kanker sudah memasuki stadium IV, hanya mampu diselesaikan dengan amputasi.¹Indonesia adalah negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan fisik maupun non fisik. Orientasi-orientasi pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada telah menciptakan kerusakan lingkungan yang parah.²Situasi ini kebanyakan terjadi kota-kota besar salah satunya di Kota Yogyakarta.

Meningkatnya tingkat kebutuhan akibat pertambahan jumlah penduduk disertai oleh perubahan gaya hidup secara kumulatif menciptakan masyarakat konsumtif yang potensial menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup.³Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010, kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 11.941 orang per km². Angka tersebut merupakan angka kepadatan penduduk paling

¹<http://www.menlh.go.id/> diakses pada tanggal oktober pada tanggal 7 oktober 2015

²Winarno Budi.(2013),*Etika Pembangunan*. CAPS (Center For Academic Publishing Service) Yogyakarta ,

³Amu, Rosalina (2014), *Kolaborasi Pengelolaan Sampah*. Independent Generation, Sleman

tinggi apabila dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk di empat kabupaten lainnya (Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo). Pembangunan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun terutama pada banyaknya jumlah hotel yang dibangun. Berdasarkan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah hotel di Yogyakarta hingga awal 2014 tercatat 399 hotel. Pembangunan hotel di Yogyakarta berdampak pada pencemaran air akibat buangan limbah dari hotel-hotel tersebut.

Masalah sampah hingga kini masih menjadi masalah krusial yang harus ditangani secara serius. Faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan sampah di DIY diantaranya adalah perilaku sadar lingkungan masalah ekonomi (retribusi). Tingkat pengetahuan sikap masyarakat tentang pengelolaan sampah di daerah pedesaan kemungkinan masih rendah sehingga mempengaruhi perilaku sadar lingkungan. Manajemen persampahan tidak hanya mengenai manajemen persampahan formal yang dilaksanakan oleh pemerintah kota saja, namun melibatkan sebagai aktor secara informal (*informal solid waste management*)⁴

Di Kota Yogyakarta luas pemukiman kumuhnya menempati peringkat teratas dibanding empat kabupaten lainnya, yaitu 278,7 hektare, disusul Sleman 41,41 hektare, dan Bantul 27,29 hektare. Sementara Kulonprogo dan Gunungkidul masih proses SK, namun luas pemukiman kumuh dari kedua kabupaten tersebut tak lebih dari masing-masing 20 hektare. “*Sebagian besar pemukiman kumuh di Kota Jogja adalah di sepanjang bantaran sungai,*” kata

⁴ Nurmandi, Achmad. *Manajemen Perkotaan; Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*. Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG), 2014

Tri Rahayu Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (PUP-ESDM) DIY di Kantornya, Selasa (2/12/2014). Dikatakan Tri Rahayu, dari 13 kecamatan pemukiman kumuh di Jogja, prioritas tahun depan adalah di Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, dan Jetis serta di bantaran Kali Winongo dan Kali Code.⁵

Dengan fakta di atas , untuk menangani permasalahan sampah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD) dengan persetujuan kepala daerah membuat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tentang pengelolaan sampah dan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai instansi terkait dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut.

Masalah sampah di Kota Yogyakarta belum dilakukan secara optimal. Metode yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta hanya mengambil dari tempat pembuangan sampah dan dikirim ke tempat pembuangan akhir yang selanjutnya tidak ada tindak lanjut belum ada inovasi atau teknologi yang modern untuk mengelola sampah secara efektif. Menurut Irfan Susilo selaku kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), rata-rata volume sampah di Kota Yogyakarta mencapai 230 ton/hari.⁶ Selain itu, cakupan penanganan sampah belum dilakukan secara menyeluruh karena masalah geografis (bantaran sungai) salah satunya di Kecamatan Mergangsan.

⁵<http://www.harianjogja.com/baca/2014/12/03/duh-kota-jogja-wilayah-terkumuh-di-diy-557090>
diakses pada tanggal 15 oktober 2015

⁶<http://www.antarayogya.com/berita/318601/voluame-sampah-di-yogyakarta-naik-10-persen>
diakses pada tanggal 25 oktober 2015

Penulis tertarik menganalisis kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mergangsan karena kecamatan tersebut memiliki kerajinan lokal yaitu mempunyai batik khusus dan sejumlah kampung wisata yang bisa dikembangkan menjadi daerah potensial. Kecamatan Mergangsan juga salah satu destinasi wisatawan mancanegara yaitu di Kampung Prawirotaman. Akan tetapi di sisi lain Kecamatan Mergangsan merupakan salah satu kecamatan kumuh di Kota Yogyakarta karena terletak berada di bantaran sungai code

Menurut Bapak Harjono salah satu anggota seksi lingkungan hidup di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan, masyarakat di Wirogunan sudah sadar akan kebersihan lingkungan dan sampah-sampah yang terdapat di sungai berasal dari hulunya. Untuk penanganan sampah, warga sendirilah yang memunguti dan mengantarkannya ke TPS yang berada dekat Stadion Mandala Krida dan membuat bank sampah. Selbihnya tidak ada kebijakan khusus dari Pemerintah Kota atau provinsi guna membersihkan sampah di Sungai Code yang melewati Kecamatan Mergangsan yang berakibat air sungai tersebut sangat tercemar.

Dari uraian latar belakang yang telah tertera di atas maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi “**Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mergangsan**” (Studi Kasus ; Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat proses kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mergangsan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui sejauh mana kinerja implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.”

D. Manfaat Penelitian

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

1. Memberikan informasi Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mergangsan bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

2. Memberikan informasi tentang kendala-kendala pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.
3. Memberikan masukan kepada Pemerintah hasil analisa kinerja implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mergangsan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai upaya evaluasi Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mergangsan tentang pengelolaan sampah.
2. Memberikan rekomendasi saran cara pengelolaan sampah di Kecamatan Mergangsan.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori adalah kumpulan teori yang digunakan oleh penulis untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan teori sebagai landasan penelitian. Sebelum masuk di kerangka teori, penulis akan memberikan definisi dari teori. Teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.⁷

⁷ Sardar Ziauddin. (1996), *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Mizan..

1. Kebijakan Publik

1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut RC. Chandler dan JC. Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan permasalahan masalah publik.⁸ Menurut Willy N. Dunn, kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan, dan lain-lain.⁹

WJS. Poerwadarminta membagi kebijakan dalam dua konsep yaitu¹⁰ :

- 1) Serangkaian konsep asas yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.
- 2) Untuk selanjutnya kebijaksanaan dan kebijakan diartikan dalam pengertian yang sama dengan kebijakan publik atau kebijakan umum.

1.2 Jenis Kebijakan

Menurut James Anderson ,jenis kebijakan dikategorikan sebagai berikut

:

- 1) Kebijakan Substantif vs kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut berjalan.

⁸ Syafiie Inu Kencana, Tandjung Djamaludin, Modeong Supardan, 1999, *Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta*, Jakarta

⁹ *Ibid hal 105*

¹⁰ Poerwadarminta (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

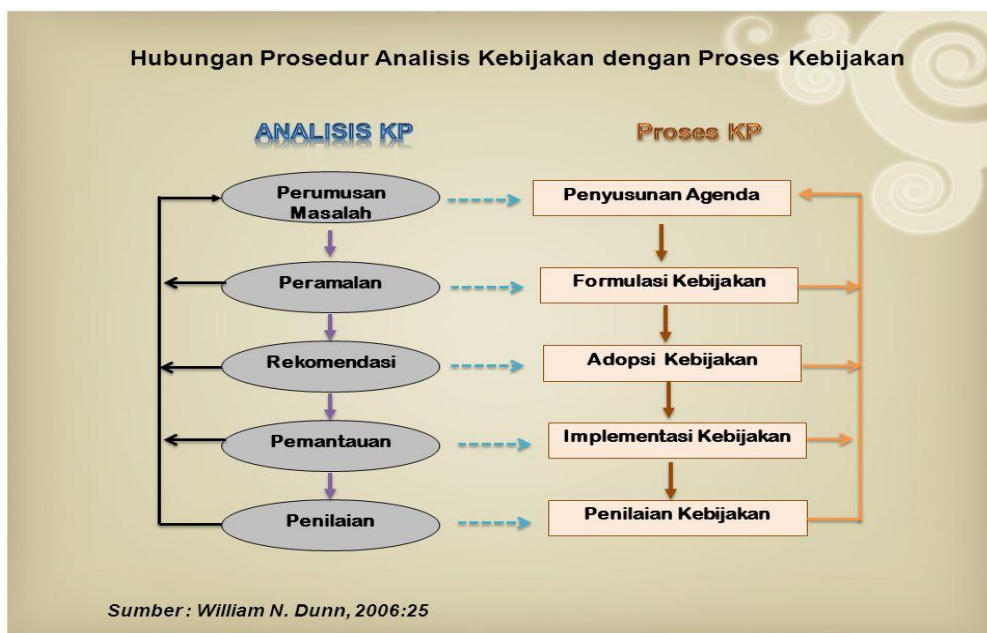
- 2) Kebijakan distributif vs kebijakan regulatif vs kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material vs kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan kongkrit bagi kelompok sasaran. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*) adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan yang berhubungan dengan *private goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

1.3 Proses Kebijakan

Dalam pembuatan kebijakan publik tidak semua permasalahan publik menjadi isu dan direpson dengan membuat kebijakan. Proses pembuatan kebijakan harus melalui beberapa tahapan yang sistematis supaya mampu mengatasi permasalahan publik secara efisien dan efektif. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam

serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi merupakan aktivitas yang lebih berifat politis.¹¹ Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.2
Proses Kebijakan Publik



Sumber : <http://slideplayer.info/slide/2780723/>

¹¹Subarsono. Analisis Kebijakan Publik ; Konsep Teori dan Analisis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Tabel 1.1
Tahapan Analisis Kebijakan

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	: Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
Forecasting (Peramalan)	: Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternative kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
Rekomendasi Kebijakan	: Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternative dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memeberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring Kebijakan	: Memberikan informasi mengenai konsekuensi sejarah dan masa lalu dari ditetapkannya alternative kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
Formulasi kebijakan	: Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Sumber :Subarsono. Analisis Kebijakan Pubik ; Konsep Teori dan Analisis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

Dalam pandangan Ripley (1985), tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.3
Proses Kebijakan menurut Ripley



Sumber : <http://www.slideshare.net/triwidodowutomo/agenda-setting-perumusan-kebijakan-publik>

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni : (1) membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; dan (3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada kebijakan yang dipilih.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil kebijakan bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru yang akan datang agar kebijakan baru akan lebih baik.

2. Implementasi Kebijakan

2.1 Penegertian Implementasi

Implementasi adalah salah satu bagian dari tahapan proses kebijakan publik. Tahapan ini dilakukan setelah kebijakan dirumuskan dengan jelas. Implementasi adalah tahapan yang sangat penting dari proses kebijakan karena dalam proses implementasi merupakan perwujudan dalam kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Secara etimologis, implementasi menurut kamus Webster sebagai berikut :

Konsep mengenai implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).¹²

¹²Solichin, Abdul Wahab 2006 *.Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Metter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.¹³

Charles O'jones menyatakan bahwa implementasi kebijakan mudah dimengerti dalam bentuknya yang abstrak, tapi tidaklah demikian dalam bentuknya yang kongkrit. Hal ini berarti bahwa proses implementasi kebijakan bukanlah suatu yang mudah, semudah yang kita pahami dalam konsep.¹⁴

Namun sebuah kerumitan yang dihadapi sebuah implementasi kiranya dapat dipahami oleh Grindle, yang menyatakan sebuah implementasi bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur melalui birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa (*who gets what*).¹⁵

¹³ Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003. Hal 169-170

¹⁴ Charles O'jones , *An Introduction to nthe Study of Public Policy*, Duxbury Press, North Scituate, Massachussets, 1997 dalam Asep Suparyono, 2008 , *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat oleh Dinas Pertahanan, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Banjar Tahun 2005-2006* , tugas akhir Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

¹⁵ Meriele S Grindle. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeto, University Press, NY, 1980, hal 4

D.2.2 Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh bagaimana tahapan implementasi berjalan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh variabel atau faktor –faktor yang saling berkesinamungan. Dalam teori George C. Edwards III yang dikutip oleh Subarsono, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (1) Komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.¹⁶

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumberdaya

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas dokumen saja.

¹⁶ Subarsono *AG Opcit*

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementator mempunyai disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standard (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

3. Kinerja

3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah prestasi yang dapat dicapai seseorang atau organisasi berdasarkan kriteria dan alat ukur tertentu. Parameter yang paling umum digunakan, menurut Drucker (1977) adalah efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Sedangkan menurut Hasibuan (1990) kinerja adalah prestasi yang ditunjukkan oleh karyawan. Ia merupakan hasil yang dapat dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu yang tersedia.¹⁷

¹⁷ Hasibuan, Malayu SP. Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta : Gunung Agung. 1990 hal 41

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai etika.¹⁸

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu (Mohamad Mahsum, 2012:25).¹⁹

3.2 Pengukuran Kinerja

Menurut Lenvine (1990) keberhasilan kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :²⁰

- a) *Responsiveness* atau responsivitas, digunakan untuk mengukur daya tangkap pemberi layanan terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan pengguna.
- b) *Responsibility* atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik ini dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
- c) *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pelayanan

¹⁸ Cardoso F. Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi Ofset, Yogyakarta, 1997, hal 135.

¹⁹ Mutiarin Dyah & Arif Zainudin. Manajemen Birokrasi & Kebijakan (Penelusuran Konsep & Teori), Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2014

²⁰ Ratminto & Winarsih A.S .*Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 175

dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Secara umum, apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi tersebut merupakan kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah, dan lain-lain. (cf. Ripley, 1986) maka indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas *policy output* adalah sebagai berikut ²¹:

a) Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnistas, agama, afiliasi politik.

²¹Purwanto & Dyah Ratih Sulistyawati. Implementasi Kebijakan Publik ; Konsep dan Aplikasinya. Yogyakarta : Gava Media, 2012

b) Cakupan

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan public yang diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk mengukur cakupan adalah :

- Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, anak sekolah, dan sebagainya). Idealnya evaluator memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak (eligible) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut.
- Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah dapat layanan terhadap total kelompok target.

c) Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut. Indikator frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali.

d) Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program

e) Service Delivery

Indikator ini dapat digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai output suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.

f) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

g) Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

4. Pengelolaan Sampah

4.1 Pengertian Sampah

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan diartikan sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan manufaktur atau menteri berlebihan atau ditolak atau dibuang.²²

Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai. Sampah adalah limbah yang bersifat padat, yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik, yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. (DPU. 1990).²³

4.2 Sumber Sampah

Sampah dapat dihasilkan dari beberapa sumber, di antaranya²⁴ :

- 1) Rumah tangga, umumnya terdiri dari sampah organik dan organik dan anorganik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Misalnya, buangan dari dapur, taman dan alat-alat rumah tangga.
- 2) Daerah komersial, yaitu sampah yang dihasilkan dari perkotaan, restoran, pasar perkantoran, hotel, dan lain-lain. Biasanya terdiri dari bahan pembungkus sisa-sisa makanan, kertas dari perkantoran, dan sebagainya.

²² Kamus Istilah Lingkungan Hidup , 1994

²³ <http://www.ilmusipil.com/pengertian-sampah> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015

²⁴ Teti Suryati, *Bijak & Cerdas Mengolah Sampah*, Jakarta: Agromedia Pustaka, 2009. Hal 16

- 3) Sampah istitusi, berasal dari sekolah, rumah sakit, dan pusat pemerintahan.
- 4) Sampah industri, berasal dari proses produksi industri, dari pengolahan bahan baku hingga hasil produksi.
- 5) Sampah dari fasilitas umum, berasal dari taman umum, pantai, atau tempat rekreasi.
- 6) Sampah dari hasil konstruksi bangunan, yaitu sampah yang beraal dari sisa-sisa pembuatan gedung, perbaikan dan pembongkaran jalan atau jembatan, dan lain-lain.
- 7) Sampah dari hasil pengelolaan air buangan dan sisa-sisa pembakaran dari incinerator.
- 8) Sampah pertanian, berasal dari sisa-sisa pertanian yang tidak dimanfaatkan lagi.

4.3 Jenis Sampah

Di negara industri, jenis sampah atau yang dianggap sejenis sampah, dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti²⁵ :

1. Pemukiman: biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya
2. Daerah komersial: yang meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara

²⁵<http://kuliaah.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2010/09/diktatsampah-2010-bag-1-3.pdf> diakses pada tanggal 9 oktober 2015

lain kertas, kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan beracun, dan sebagainya

3. Institusi: yaitu sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah komersial - Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu, baja, beton, debu, dan lain-lain
4. Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbish, sampah taman, ranting, daun, dan sebagainya
5. Pengolah limbah domestik seperti Instalasi pengolahan air minum, Instalasi pengolahan air buangan, dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain lumpur hasil pengolahan, debu, dan sebagainya
6. Kawasan Industri: jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa proses produksi, buangan non industri, dan sebagainya
7. Pertanian: jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk, sisa pertanian.

Menurut sifatnya sampah terbagi menjadi 2 yaitu sampah organik dan anorganik. Untuk mempermudah pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA), sampah dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah dipilah menjadi tiga, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3 (Bahan berbahaya beracun). Masing-masing jenis sampah diklasifikasikan dengan tempat sampah yang berbeda.

Jika pengklasifikasi ini diterapkan, diharapkan memudahkan proses pengolahan sampah pada tahap selanjutnya.²⁶

1. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan). Jenis sampah ini tidak berbahaya karena bisa terurai secara biologis oleh alam. Contoh sampah organik seperti kulit buah, daun kering, ranting dan kayu pohon dan sejenisnya.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah lawan dari sampah organik yaitu sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Jenis sampah ini dapat didaur ulang seperti sampah plastik atau logam.

3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Sampah B3 merupakan jenis sampah yang bisa dikategorikan membahayakan manusia dan lingkungan, Sampah ini mengandung bahan kimia berbahaya. Contohnya seperti pembersih kamar mandi, semprotan serangga, atau bekas minyak wangi.

4.4 Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2013 Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka menangani permasalahan sampah dari proses sejak ditimbulkan sampah sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan

²⁶ Setyo Purwedro & Nurhidayat, Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Peptisida Organik. Jakarta : Penebar Swadaya, 2007

pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transpor, pengolahan dan pembuangan akhir.²⁷

1. Penimbunan Sampah

Pada dasarnya sampah tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan. Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbunan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku jenis kegiatannya. Idealnya untuk mengetahui besarnya timbulnya sampah yang terjadi, harus dilakukan dengan satu studi. Tetapi untuk keperluan praktis telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah SK SNI S-04-1993-03 tentang spesifikasi timbunan sampah untuk kota besar dan kota sedang. Diatur demikian, besarnya timbunan sampah untuk kota sedang adalah 2,75-2,25 liter/orang/ hari atau 0,7-0,8/kg/orang/ hari, sedangkan untuk kota besar seperti Yogyakarta 1kg/ hari/orang.

2. Penanganan di Tempat (*On Site handling*)

Adapun yang dimaksud dengan penanganan sampah ditempat atau pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di lokasi tempat pembuangan. Suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, sering kali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap-tahap selanjutnya.

²⁷ Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal 24

Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya, antara lain meliputi pemilihan (*sorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utamanya adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*).

3. Pengumpulan (*collecting*)

Pengumpulan ini merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal.

4. Pengangkutan (*transfer/transport*)

Pengangkutan merupakan usaha pemindahan sampah dari TPS menuju TPA dengan menggunakan truk sampah.

5. Pengolahan (*treatment*)

Sampah dapat diolah tergantung jenis dan komposisinya. Berbagai alternatif yang tersedia dalam proses pengolahan sampah di antaranya sebagai berikut :

- a. Transformasi Fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan yang bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan.
- b. Pembakaran (*incinerate*) merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang hingga 90-95%. Meskipun merupakan teknik yang efektif namun teknik bukan teknik yang dianjurkan. Hal ini disebabkan karena teknik ini sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Di samping itu teknik baru

ini akan berfungsi dengan baik apabila kualitas sampah yang diolah memenuhi syarat tertentu, seperti tidak terlalu banyak mengandung sampah basah dan mempunyai nilai kalori yang tinggi.

- c. Pembuatan Kompos (composting) yaitu mengubah melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat dipergunakan. Output dari proses ini adalah kompos dan gas bio.
- d. *Energy recovery*, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan di negara maju.

6. Pembuangan Akhir

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah open dumping, yaitu sampah yang ada hanya ditempatkan begitu saja hingga kapasitasnya tidak lagi terpenuhi. Teknik ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Adapun teknik yang direkomendasikan adalah *sanitary landfill* yaitu pada lokasi TPA dilakukan kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah.

Kenyataan yang ada saat ini, sampah menjadi sulit dikelola oleh karena berbagai hal :²⁸

- a. Pesatnya perkembangan teknologi, lebih cepat dari kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami masalah persampahan
- b. Meningkatnya tingkat hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan

²⁸<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30773/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal

- c. Meningkatnya biaya operasi, pengelolaan dan konstruksi di segala bidang termasuk bidang persampahan
- d. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, tidak benar, menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah, sehingga juga memperbanyak populasi vector pembawa penyakit seperti lalat dan tikus
- e. Kegagalan dalam daur ulang maupun pemanfaatan kembali barang bekas juga ketidakmampuan masyarakat dalam memelihara barangnya sehingga cepat rusak, Ataupun produk manufaktur yang sangat rendah mutunya, sehingga cepat menjadi sampah Pengolahan tahap akhir : - *Sanitary landfill (penimbunan berlapis)* - Incenaration (pembakaran) - Open dumping Pengolahan tahap awal : - Reduce (mengurangi) - Reuse (menggunakan kembali - Recycle (mendaur ulang)
- f. Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai Tempat Tembuangan Akhir (TPA) sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi pembuangan sampah juga terjadi kompetisi yang semakin rumit akan penggunaan tanah
- g. Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya dipakai sebagai tempat pembuangan sampah
- h. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan
- i. Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena cuaca yang semakin panas.

- j. Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan memelihara kebersihan
- k. Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini kebanyakan sampah dikelola oleh pemerintah
- l. Pengelolaan sampah di masa lalu dan saat sekarang kurang memperhatikan faktor non teknis dan non teknis seperti partisipasi masyarakat dan penyuluhan tentang hidup sehat dan bersih.

Menurut Departemen kesehatan Pengolahan sampah secara umum terbagi menjadi 7 yaitu²⁹ :

- a. Menggiling, dengan menggiling atau menghancurkan dengan alat (grinder) maka sampah yang mudah membusuk dihancurlumatkan dan dibuang bersama dengan air limbah ke saluran pembuangan air limbah.
- b. Menyortir. Tempat dimana sampah dipisahkan-pisahkan mengingat bahwa yang terdapat dalam sampah ada yang masih berguna.
- c. Pemadatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi volume dengan menggepengkan sampah sehingga dapat meminimalisir ruangan.
- d. Mengiris-iris dan menghancurkan sampah dengan air (hydropulpery). Setelah sampah diiris-iris lalu dilumatkan menggunakan air dalam mesin penghancur setelah itu dipisahkan kembali dan dipadatkan.

²⁹Zulhan Arif Nur Dwiansyah, 2014 ,*Manajemen Pengelolaan Sampah* di Kabupaten Pacitan , tugas akhir Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

- e. Membuat kompos. Selain mengurangi volume sampah dengan cara ini dapat menghasilkan kompos yang dapat dipergunakan menjadi pupuk.
- f. Pembakaran. Pembakaran disini bukan pembakaran disembarang tempat melainkan membakar sampah ditempat pembakaran yang disebut incinerator. Dimaksudkan untuk mengurangi volume dan merubah bentuk fisik dari sampah

F. Definisi Konseptual

1. Kebijakan Publik adalah respon/sikap dari pemerintah terhadap isu publik kemudian mengolah isu-isu tersebut melalui tahapan kemudian ditetapkanlah suatu kebijakan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia.
2. Implementasi Kebijakan adalah salah satu bagian terpenting dari proses kebijakandengan melaksanakan rumusan kebijakan yang telah dibuat dan disepakati oleh pembuat kebijakan.
3. Kinerja adalah suatu gambaran dari hasil pencapaian individu dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi yang telah tertuang dalam rencana strategis yang dapat diukur dari kriteria tertentu.
4. Pengelolaan Sampah adalah semua proses kegiatan dalam rangka menangani permasalahan sampah dari hulu ke hilir yang dikelola para pengelola sampah dalam rangka mensejahterakan masyarakat dalam bidang kesehatan dan menjaga kelestarian lingkungan dari polusi dan pencemaran.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini menganalisis kinerja Badan Lingkungan Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah (Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 di Kecamatan Mergangsan) dalam maka penulis mengambil teori indeks pengukuran kinerja output dari Ripley yaitu :

1. Akses

Indikator akses pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas Persampahan Fisik
- b. Komunikasi berupa sosialisasi Bank Sampah

2. Cakupan (coverage)

Indikator cakupan merupakan tolak ukur apakah kebijakan/program kinerja dari Badan Lingkungan Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah (Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 di Kecamatan Mergangsan) sudah menjangkau Kecamatan Mergangsan yang meliputi tiga kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Wirogunan
- b. Kelurahan Keparakan
- c. Kelurahan Brontokusuman

3. Frekuensi

Indikator frekuensi bisa dilihat dari seberapa sering program/kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan di Kecamatan Mergangsan.

4. Bias

Indikator bias dapat dilihat dari adanya tindakan penyimpangan dalam kinerja implementasi dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

5. Service delivery (ketepatan layanan)

Indikator service delivery dapat diukur dari apakah kebijakan/program dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sudah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tidak.

6. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan

Indikator Akuntabilitas diukur dari rasionalitas dan pertanggungjawaban kebijakan/program dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang telah dijalankan di Kecamatan Mergangsan.

7. Akuntabilitas

Indikator Kesesuaian program diukur dari keefektifan kebijakan/program Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah apakah sudah bisa mengurangi jumlah sampah di Kecamatan Mergangsan

H. Metode Penelitian

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.³⁰

Metode penelitian adalah bagaimana secara berurutan suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan (Moh. Nazir, 2005:44).³¹

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong (1993:3) yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif ialah :³²

“Sebagai sebuah prosedur dasar penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”

Kemudian Creswell (1994:145) mengemukakan bahwa ada beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif ini, diantaranya:

1. Para peneliti kualitatif mempunyai perhatian yang lebih utama dengan proses daripada hasil atau produk.
2. Para peneliti kualitatif lebih tertarik dengan makna, bagaimana orang-orang memberikan makna terhadap kehidupan, pengalaman dan struktur mereka terhadap dunia

³⁰Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hal 1 dalam Nasution, S. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

³¹Nazir, Moh. "*Metode penelitian*." (2003).

³²Moleong, Lexi J. *Metode penelitian*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

3. Para peneliti kualitatif merupakan instrumen utama untuk pengumpulan dan penganalisaan data
4. Penelitian kualitatif melibatkan kerja lapangan, dimana peneliti biasaya melakukan observasi terhadap orang-orang, keadaan, atau institusi dalam setting yang alamiah
5. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana peneliti lebih tertarik dengan proses, makna dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata atau gambar-gambar
6. Proses dari penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membangun abstraksi, konsep-konsep, hipotesis, dan teori secara terperinci.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antarvariabel yang ada; tidak dimaksudkan untuk menarik generasi yang menjelaskan variabel-variabel antededen yang menyebabkan sesuatu gejala atau kenyataan sosial.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah

b. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Selain itu akan ada instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta karena instansi tersebut

mempunyai peran penting dalam terlaksananya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

c. Unit Analisis

Dalam penelitian ini akan memperoleh sumber informasi atau sumber data dari :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Tokoh masyarakat di tiap kelurahan Kecamatan Mergangsan

d. Jenis Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan unit analisis penelitian yaitu Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang valid untuk menguji kebenaran hipotesis, adapun beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara interaksi langsung dari pewawancara kepada yang terwawancara. Menurut Esternberg (2002) , *interview a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about particular topic.* (Wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu).³³

Pada penelitian ini wawancara akan ditujukan kepada sumber-sumber sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar Narasumber Wawancara Penelitian

No	Narasumber
1	Irfan Susilo, Kepala Badan Lingkungan Hidup
2	Tokoh Masyarakat tiap Kelurahan di Kecamatan Mergangsan

2. Dokumkentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan cara mengutip data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

³³Satori Djam'an & Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012

f. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan yaitu analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa studi kasus dan monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit.

Dengan menggunakan teknik analisa data yang didapat di dalam penelitian (lapangan) tidak lagi dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus (angka-angka) tetapi data yang diperoleh tersebut diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Prosedur dalam pengumpulan data sampai pada pengambilan generalisasi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data atau informasi dilapangan yang bersifat primer atau sekunder, bersifat kualitatif.
- b. Memeriksa data yang telah diperoleh dilapangan.
- c. Menyusun klasifikasi informasi di dalam data yang diperoleh.
- d. Mendeskripsikan sekaligus menganalisa dan menginterpretasikan.
- e. Mengambil kesimpulan.³⁴

³⁴Arikunto, Suharsini (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta; Bina Aksara, hal 19.